

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era digitalisasi, pemerintah di beberapa negara menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan teknologi dalam tata kelola administrasi publik. Sistem digital pelayanan publik dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan, hal ini juga termasuk di bidang perizinan usaha. Pengintegrasian digitalisasi di beberapa negara lain menunjukkan variasi pendekatan dalam mengelola perizinan usaha dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Digitalisasi diadopsi dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan, mempercepat investasi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan serta berkelanjutan.

Seperti negara Singapura yang dikenal sangat efisien dalam penerapan digitalisasi di setiap sektor, khususnya pada perekonomian dan perizinan. Singapura memiliki platform BizFile+, yang dijalankan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). Dimana Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan izin usaha, memperbarui informasi perusahaan, serta mengelola keperluan legal secara digital. Sistem ini juga memungkinkan integrasi perizinan berbagai sektor, dari usaha kecil hingga perusahaan besar, dengan pendekatan berbasis risiko. Pengawasan lebih ketat diterapkan pada sektor-sektor dengan risiko tinggi seperti keuangan, kesehatan, dan teknologi.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah melakukan salah satu upaya untuk mewujudkan transformasi digital pada beberapa daerah di Indonesia, salah satunya dalam bidang perizinan yakni melalui penerapan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA). Menurut (Fadjar Trisakti, 2021) pemerintah perlu menekankan transformasi pelayanan publik melalui

paradigma desentralisasi. Model desentralisasi di Indonesia diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah otonom untuk mengelola kepentingan pelayanan pemerintah daerah berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat setempat. Penerapan undang-undang otonomi ini memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan daerah.

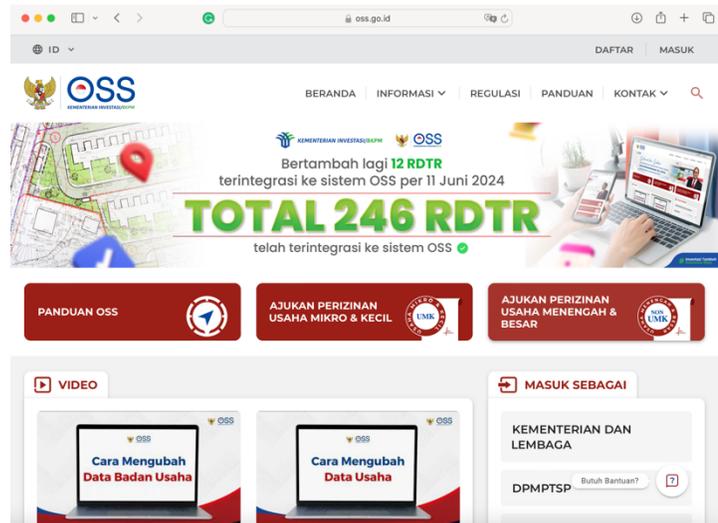
Hal ini selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2017** tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan di Provinsi Jawa Barat, yang menekankan pentingnya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, sistem OSS-RBA sendiri telah digunakan pada beberapa Instansi Dinas pemerintahan, baik itu dalam lingkup nasional maupun kedaerahan. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi program pembangunan berkelanjutan sehingga memajukan perekonomian, serta mempermudah proses perizinan khususnya pada sektor pertambangan.

Merujuk pada paragraph sebelumnya, Provinsi Jawa Barat dengan potensi sumber daya yang melimpah memiliki peran sentral dalam pengelolaan sektor pertambangan. Namun, terdapat masalah kompleks mengenai perizinan dan ketidaksesuaian data antara besaran investasi yang sesungguhnya dengan dokumen yang terinput ke dalam sistem. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam penataan ruang dan perizinan, khususnya untuk usaha dengan resiko tinggi seperti pertambangan. Kesalahan atau ketidaksesuaian ini tidak hanya berdampak pada lambatnya proses perizinan, tetapi juga memperburuk hubungan antar pemangku kepentingan. Proses interaksi antar pemangku kebijakan menjadi terhambat, di mana keputusan sering kali lebih terfokus pada pihak-pihak yang memiliki kuasa dibandingkan dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan dan kesesuaian tata ruang.

Sektor pertambangan sebagai salah satu sektor strategis dalam upaya pembangunan ekonomi Indonesia, tentu sangat membutuhkan perhatian khusus dalam proses perizinan, terutama pada aspek kesesuaian tata ruang. Sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Provinsi Jawa Barat. Namun, di balik potensi ekonominya, sektor pertambangan juga menyimpan berbagai tantangan yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan, sosial, dan tata ruang. Proses kesesuaian tata ruang sektor pertambangan menjadi sangat krusial karena kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang dapat menimbulkan banyak dampak negative baik terhadap kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karenanya, integrasi antara sistem OSS-RBA dalam mempercepat dan mempermudah proses verifikasi kesesuaian tata ruang sektor pertambangan menjadi faktor utama.

Transformasi digital menjadi pendorong utama dalam reformasi sektor publik di Indonesia. Salah satu inisiatif utama dalam transformasi digital di Indonesia ialah tadi penerapan OSS-RBA (Online Single Submission - Risk-Based Approach). OSS-RBA dibangun sejak bulan Agustus 2021, dan mulai diterapkan pada dinas-dinas teknis khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimulai pada tahun 2023. Sistem ini sendiri memberikan kemudahan dalam mengakses layanan perizinan secara daring, sehingga ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan. Kemudian, karena sistem ini dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, termasuk dengan perizinan tata ruang di sektor pertambangan yaitu melalui pendekatan berbasis risiko. Proses perizinan tata ruang di sektor pertambangan di Indonesia seringkali dihadapkan pada kompleksitas regulasi dan birokrasi yang dapat menghambat investasi. Didalamnya termasuk

kesesuaian tata ruang yang juga menjadi salah satu aspek penting yang harus dipatuhi dalam proses ini.



Gambar 1: Tampilan beranda OSS RBA

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam proses perizinan investasi pada sektor pertambangan, termasuk kesesuaian tata ruang. Sehingga perlu mengadopsi strategi transformasi digital yang lebih komprehensif dan terukur, efektif dan optimal dalam mengimplementasikan OSS-RBA. Tentu transformasi digital di sini tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi saja, tetapi juga pada perbaikan sistemik yang mampu mengatasi hambatan birokrasi, ketidaksesuaian data, serta dinamika relasi kuasa antar pemangku kepentingan agar tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang menyertai.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan dalam konteks implementasi OSS-RBA dalam proses kesesuaian tata ruang sektor pertambangan di Jawa Barat belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini diduga belum dilaksanakannya aspek-aspek yang mencakup dalam ketiga dimensi ini, diantaranya sari sisi **manajerial**, sistem OSS-RBA belum mampu menangani

secara akurat data investasi yang dimasukkan oleh pelaku usaha, menyebabkan ketidaksesuaian dengan risiko usaha sebenarnya. Pada dimensi **politik**, terjadi tarik-menarik kepentingan antar pemangku kebijakan yang menghambat sinergi lintas sektor dan berdampak pada ketimpangan keputusan perizinan. Sedangkan pada dimensi **kognitif**, perbedaan pemahaman antar aktor pelaksana terhadap substansi kebijakan dan aturan teknis OSS-RBA menyebabkan interpretasi yang tidak seragam dan mengganggu efektivitas implementasi di lapangan.

Nomor Permohonan	Nama Perusahaan	KBLI	Alamat	Skala Usaha	Jumlah Waktu
1-202210250813019174108	Perseroan Terbatas (PT) SPYCOM ELECTRONIC INDONESIA	43211	31 Hutan Hamid Rd 005 Rv 011	Usaha Mikro	- Hari Kerja
202210-2508-0435-5428-197	Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) SPYCOM ELECTRONIC INDONESIA	SEKTOR : Energi dan Sumber Daya Mineral	Jawa Barat Kab. Karawang	Usaha Mikro	Terbit Otomatis
25 Oktober 2022		Modal Usaha : Rp 19.000.000	Kecamatan : Karawang Barat	Risiko : Tinggi	
Jenis Perumahan : Baru	Nomor Identitas : 5205010709750006	Luas Lahan : 100 M ²	Kelurahan/Desa : Nagasari		
	NIB : 2510220004733	Jenis Kegiatan Usaha : Utama			
1-202209281412047654821	Perseroan Terbatas (PT) ASRI KEMA TAMA	99900	Komplek Ruko Delta Niaga II Jl. Waru Blok C No. 19 Cibatu Cikarang	Skala	
	Jenis Perusahaan :	SEKTOR : Energi dan Sumber			

Gambar 2: Contoh Usaha Tambang yang dicurigai Menginput Data Besaran Investasi yang Tidak Sesuai dengan Resiko Usaha

Selain daripada hal tersebut, tantangan lain yang mencuat ialah implikasi regulasi terkait kewajiban Pengesahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) seperti yang tertera pada Gambar 2 diatas, terutama bagi pelaku usaha skala kecil. Regulasi yang tidak mengharuskan PKKPR untuk usaha skala kecil menimbulkan potensi perbedaan perlakuan dalam penerbitan izin, terutama pada usaha berskala kecil tetapi beresiko tinggi, seperti pertambangan. Permasalahan ini menjadi krusial karena jika besaran investasi usahanya kecil, maka hal tersebut membuat izin terbit secara otomatis melalui OSS-RBA walaupun skala resiko usaha termasuk kepada golongan Resiko Tinggi. Meski dapat dilihat dari dokumen pendukung yang terlampir

pada sistem OSS, namun secara alur proses evaluasi hal ini dilakukan di akhir. Evaluasi dilakukan oleh dinas teknis terkait namun verifikasi teknisnya berada di Dinas PMPTSP. Oleh sebab itu, seringkali terjadi kesalahan dalam proses evaluasi pertama dari dinas teknis dan pengembalian dokumen investasi yang rumit. Ketidaksesuaian ini berdampak signifikan terhadap perizinan usaha dan penataan ruang di sektor pertambangan. Interaksi antar aktor publik yang memegang kendali atas terbitnya perizinan juga, menghadirkan potensi pengabaikan aspek teknis dan legal dalam proses perizinan dan tata ruang. Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana implementasi OSS-RBA dapat memastikan penegakan regulasi yang adil dan optimal, serta bagaimana kebijakan ini dapat mendukung proses penataan ruang yang berkelanjutan.

Pengaturan aktivitas pertambangan secara menyeluruh telah diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan di Provinsi Jawa Barat, yang menekankan pentingnya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah secara substansial sejumlah aspek tata kelola pertambangan, khususnya kewenangan dalam perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat – mulai dari penerbitan izin hingga pengawasan. Pengaturan mengenai perizinan pertambangan juga beririsan dengan kebijakan lain, seperti pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), otonomi daerah, dan good governance (transparansi dan akuntabilitas). Hal ini memunculkan perbenturan hak pengambilan keputusan atau kebijakan yang justru di titik beratkan pada interaksi antar relasi kuasa, yang mana hal tersebut membuat kendali dari kebijakan diputuskan oleh aktor publik Dinas terkait.

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang dengan materi muatannya bersifat sentralistik tersebut secara tidak langsung tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Berpotensi menimbulkan inkonsistensi dengan UU terbaru karena substansinya yang belum selaras. Disamping itu pula, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun regional.

Undang-undang ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan terbaru karena substansinya belum diharmonisasikan secara optimal. Hal ini terutama berdampak pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan, di mana pembangunan harus terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun regional. Perubahan tersebut tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek hukum dan kebijakan yang memerlukan penyesuaian regulasi agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Kaitan ini menjadi sangat jelas dalam konteks implementasi digitalisasi melalui OSS-RBA (Online Single Submission - Risk-Based Approach) di sektor pertambangan, khususnya pada proses kesesuaian tata ruang. Penerapan digitalisasi yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi justru menimbulkan celah kecurangan akibat adanya inkonsistensi regulasi. Regulasi yang tidak sinkron menyebabkan persyaratan perizinan pertambangan tidak terpenuhi dengan baik, sehingga substansi kebijakan tidak berjalan selaras dengan tujuannya. Ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan perkembangan teknologi ini mengakibatkan proses perizinan tidak hanya menjadi rawan penyimpangan, tetapi juga menghambat terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait implementasi OSS RBA (*online single*

submission – risk based approach) dalam proses kesesuaian tata ruang sektor pertambangan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Untuk menganalisis hal tersebut, peneliti menggunakan teori dari (Hupe, 2009) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu Manajemen, Politik, dan Kognitif. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah **“Implementasi OSS RBA (*Online Single Submission – Risk Based Approach*) Dalam Proses Kesesuaian Tata Ruang Sektor Pertambangan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat”**.

Penelitian ini menjadi penting karena mengkaji proses implementasi kebijakan dalam bentuk transformasi digital yang efektif dan holistic dengan konteksnya implementasi OSS-RBA dalam proses kesesuaian tata ruang di sektor pertambangan, khususnya di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Dengan memahami tantangan utama seperti ketidaksesuaian data dan masalah relasi kuasa, penelitian ini akan mengkaji proses implementasi dan memberikan solusi yang dapat diadopsi untuk memberikan rekomendasi kebijakan terkait proses kesesuaian tata ruang di sektor pertambangan, serta pemahaman terkait proses perizinan melalui implementasi OSS RBA pada sektor pertambangan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan di Provinsi Jawa Barat, yang menekankan pentingnya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang efisien, transparan, dan akuntabel dan juga pada PP No. 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pada akhirnya, diharapkan digitalisasi pada proses birokrasi ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan investasi di sektor pertambangan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut terjadi secara berkelanjutan, sesuai dengan regulasi usaha sektor pertambangan, perencanaan tata ruang, dan memperhatikan aspek lingkungan serta sosial, dan dampaknya terhadap perekonomian.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah yang terdapat pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian antara data besaran investasi usaha yang sebenarnya dengan dokumen yang terinput dalam sistem OSS-RBA.
2. Mengganggu proses interaksi antar pemangku kebijakan, sehingga keputusan sering kali terfokus pada pihak-pihak dengan kekuasaan lebih besar.
3. Karena konsep OSS-RBA trust but verified, ini membuat pengisian data pada sistem sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha.
4. Regulasi yang mengatur terkait pertambangan tidak mengharuskan pelaku usaha yang besaran investasi usahanya kecil memiliki PKKPR.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa fenomena yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen OSS-RBA dalam Proses Kesesuaian Tata Ruang Sektor Pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana dinamika politik dalam proses perizinan melalui OSS RBA?
3. Bagaimana aspek kognitif dalam implementasi OSS-RBA pada proses perizinan kesesuaian tata ruang sektor pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat?

Rumusan masalah ini akan memandu penelitian dalam mengeksplorasi Implementasi OSS- RBA dalam proses kesesuaian tata ruang sektor pertambangan, serta memastikan bahwa kolaborasi antar pemangku

kepentingan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berjalan berdasarkan kebijakan yang berlaku.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah yang hadir dalam penelitian ini, maka dengan itu peneliti memiliki tujuan dari penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi OSS RBA (Online Single Submission – Risk-Based Approach) dalam Proses Kesesuaian Tata Ruang Sektor Pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat” berikut diantaranya:

1. Memahami secara holistik implementasi OSS-RBA dalam proses perizinan kesesuaian tata ruang di sektor pertambangan di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis dinamika yang terjadi dalam penerapan OSS-RBA di sektor pertambangan, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi.
3. Mengidentifikasi langkah strategis yang diambil dalam pengadopsian teknologi digital dalam proses perizinan.
4. Menilai dampak implementasi OSS-RBA terhadap perumusan kebijakan perizinan kesesuaian tata ruang sektor pertambangan.
5. Menganalisis interaksi antar aktor yang terlibat dalam implementasi OSS-RBA.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam segi teoritis maupun segi praktis, serta mendorong transformasi digital yang lebih efektif di sektor publik, khususnya dalam proses perizinan tata ruang sektor pertambangan. Diantaranya sebagai berikut:

A. Segi Teoritis

- a) Pengembangan Teori Transformasi Digital:

Penelitian ini diharap memberikan kontribusi pada literatur transformasi digital dengan memberikan fokus tentang bagaimana strategi transformasi digital dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks kesesuaian tata ruang sektor pertambangan. Ini mempengaruhi keberhasilan transformasi digital di sektor publik.

b) Pendekatan Risk-Based dalam Perizinan:

Dengan mengkaji implementasi OSS-RBA, penelitian ini mengidentifikasi dinamika yang hadir dalam penerapan pendekatan ini, sebagaimana OSS-RBA juga diterapkan dalam konteks lain.

c) Model Integrasi Teknologi dalam Birokrasi:

Penelitian ini menjadi gambaran dalam pengembangan model atau kerangka kerja untuk integrasi teknologi dalam proses birokrasi. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori tentang bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administratif dalam sektor publik.

B. Segi Praktis

a) Perbaikan Kebijakan dan Regulasi

Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kepada penentu kebijakan dalam menyusun regulasi yang mendukung transformasi digital dan kesesuaian informasi investasi di sektor publik. Dengan memahami hambatan dan faktor penunjang dalam implementasi OSS RBA, pemerintah dapat dituntut untuk dapat mengembangkan kebijakan yang lebih responsive serta relevan terhadap kebutuhan digitalisasi.

b) Interaksi Antar Relasi Kuasa

Penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah dalam hal ini memiliki otoritas dalam penentuan kebijakan atas perizinan dan tata ruang, termasuk dalam implementasinya di OSS-RBA. Dengan penyesuaian internal dalam dinas untuk mengadopsi sistem OSS-RBA melibatkan koordinasi dan kolaborasi yang kompleks antara dinas teknis, termasuk pemerintah pusat, pelaku usaha, masyarakat, dan teknologi pendukung.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran disini berfungsi sebagai bahan dasar dalam berpikir, sehingga menjadi acuan untuk fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini. Mengenai penelitian ini yang berjudul Implementasi OSS RBA (Online Single Submission - Risk-Based Approach) dalam Proses Kesesuaian Tata Ruang Sektor Pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat, maka dalam proses penelitiannya akan mengacu pada teori yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. Untuk menganalisis hal tersebut peneliti menggunakan teori dari (Hupe, 2009) yang meyakini bahwa Implementasi Kebijakan Publik memiliki tiga dimensi diantaranya Management, Politics, dan Cognitive. Adapun penjelasan daripada teori yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

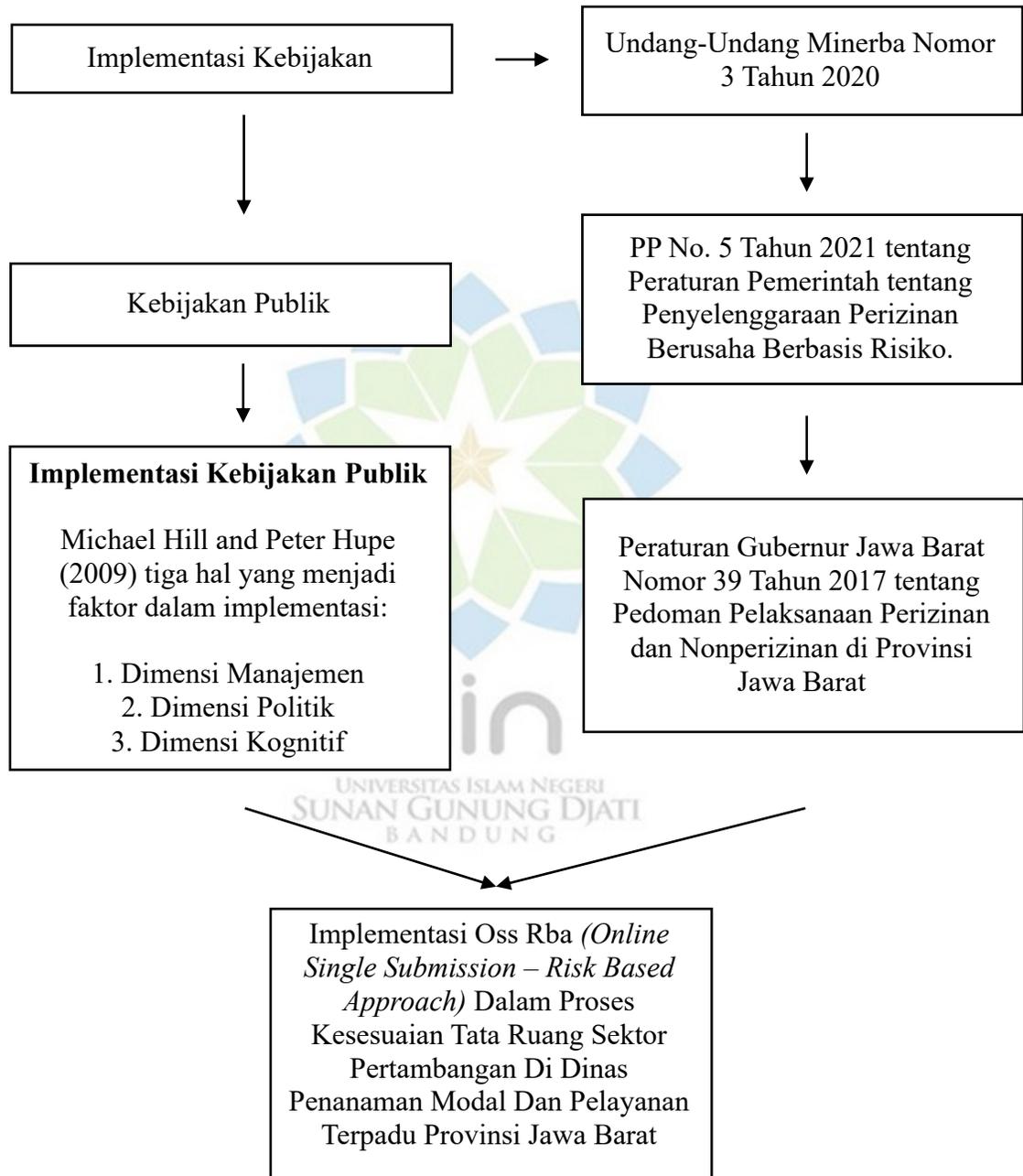
Pertama, Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Implementasi yang mana teori ini dikemukakan oleh (Hupe, 2009) dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (2nd Edition) dalam bukunya menekankan pendekatan multi-level dalam implementasi kebijakan. Teori ini menyoroti pentingnya keterlibatan aktor di berbagai tingkatan pemerintahan dan organisasi dalam memahami bagaimana kebijakan diimplementasikan. Fokusnya adalah pada bagaimana interaksi antaraktor dan dinamika level-level yang berbeda dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Kemudian, Middle Theory dari penelitian ini teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh (Hupe, 2009) melihat kebijakan publik sebagai hasil dari masukan (input) dari masyarakat, pemrosesan di lembaga pemerintah, dan keluaran (output) berupa kebijakan yang diimplementasikan. Dalam OSS RBA, masukan dari industri pertambangan dan pemangku kepentingan lainnya akan memengaruhi proses kesesuaian tata ruang, di mana keluaran berupa perizinan dan regulasi tata ruang harus dievaluasi untuk memastikan optimalisasi implementasinya. Pada teori ini terdapat tiga dimensi diantaranya terkait dimensi manajemen, dimensi politik, serta dimensi kognitif.

Terakhir, adalah Apply Theory yang merujuk pada penelitian ini yaitu terkait dengan teori Implementasi Kebijakan Publik, di mana dalam konteks implementasi OSS-RBA di sektor pertambangan Jawa Barat, penelitian ini akan melihat bagaimana ketiga dimensi tersebut (manajemen, politik, dan kognitif) berinteraksi dalam proses kesesuaian tata ruang, di mana izin usaha harus disesuaikan dengan regulasi tata ruang yang ada. Interaksi antar-aktor yang terlibat dalam perencanaan tata ruang, penyederhanaan proses perizinan, serta faktor-faktor politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan akan dianalisis secara mendalam.

Penelitian ini juga akan memfokuskan pada bagaimana pengadopsian aspek digitalisasi dari implementasi sistem OSS-RBA diterapkan dalam konteks kesesuaian tata ruang di sektor pertambangan, terutama di Provinsi Jawa Barat. Dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan multi-level dari Hill dan Hupe penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi OSS-RBA dalam proses kesesuaian tata ruang, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan di masa depan. Berikut penjabarannya dalam bentuk table dibawah ini:

Tabel 1: Kerangka Berpikir



Sumber 1: Data Diolah Peneliti (2024)